

ABSTRAK

Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Namun dalam pengawasannya yang melibatkan lembaga atau instansi di luar daripada Lembaga Pemasyarakatan tidak disertai dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Metode yang di pakai dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa metode penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak terlepas dari unsur normatif, karena aparat pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berwujud undang- undang,peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan menteri dan sebagainya. Dari hasil pengamatan dan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, PANCUR BATU pengaturan dalam pemberian remisi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan aturan yang dipakai sangat maju adanya pembaruan setiap saat mengikuti peraturan Undang-Undang RI. Serta dalam hal pelaksanaan dan mekanisme pemberian remisi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu masih adanya hak yang selalu di berikan kepada narapidana dalam pemberian remisi tambahan kepada narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu selalu inisiatif mensosialisasikan langkah-langkah pemberian remisi terhadap peraturan terbaru yang yang disosialisasikan kepada narapidana.

Kata Kunci : Remisi , Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

Giving remissions to prisoners is an order from the law as a stimulus so that prisoners are willing to undergo coaching to change behavior in accordance with the goals of the Correctional System. However, in its supervision involving institutions or agencies outside of the Correctional Institution, it is not accompanied by the existence of a firm regulation in its implementation. The method used in this journal is the sociological juridical method which means that the research method is about the suitability of the discussion of the problem with applicable legal provisions, and to see the reciprocity that arises between social life and law enforcement officers or agencies in this research. So in this study the sociological nature cannot be separated from the normative element, because government officials have carried out their duties based on statutory regulations in the form of laws, government regulations, presidential decrees, ministerial regulations and so on. From the results of observations and research at the Class II A Penitentiary, PANCUR BATU, the regulation in granting remissions by the Penitentiary is very advanced, the regulations are updated every time following the Indonesian Law. As well as in terms of the implementation and mechanism of granting remissions carried out by the Class II A Pancur Batu Penitentiary, there are still rights that are always given to inmates in granting additional remissions to prisoners. The Pancur Batu Class IIA Penitentiary always takes the initiative to socialize the steps for granting remissions to the latest regulations that have been socialized to prisoners.

Keywords : Remission, Prisoners, Correctional Institution